

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Deokrasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrinowo, Hakristuti. 2000. "Redefinisi Tindak Pidana Dalam Lingkup Peradilan Militer : Masalah Yurisdiksi." 8.
- Henry. 1991. *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*. West Group, St. Paul-Minnesota.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. 1984. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru0Van Hoeve.
- Indrajit, Wahyoedho. 2002. *Prospek Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Tesis)*. Jakarta.
- Lintong O, Siahaan. 1980. *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*. Jakarta.
- Lopa, Bharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Pengakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mahkamah Agung, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana Internasional*. Erlangga.
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pornomo. 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Semma, Mansyur. 2008. *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta.
- Sianturi, SR. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sjarif, Amiroeddun. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soegiri, dkk. 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: India Djaya.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Pengarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Untuk Perkara Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi , dan Mahkamah Agung*,Mahkamah Agung, Jakarta.
- Wajowasito, S. 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal, Skripsi, Makalah

Subketi, Niken, Budi Utama, and Supriyadi. 2013. "Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana." *Laporan Akhir Penelitian*, Yogyakarta.

Supriyadi. 2004. "Kebijakan Legislatif Mengenai Hukum Pidana Militer Indonesia". *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

D. Internet

Tempo, "Kementerian Pertahanan Usut Dugaan Korupsi Perwira TNI", dalam <https://nasional.tempo.co/read/751044/kementerian-pertahanan-usut-dugaan-korupsi-perwira-tni>, diakses 12 September 2019.

Detiknews, "Panglima TNI Beberkan Kronologi Terbongkarnya Kasus Heli AW 101", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3512299/panglima-tni-beberkan-kronologi-terbongkarnya-kasus-heli-aw-101>, diakses 12 September 2019.

Tempo, "Jenderal Djaja Suparman Divonis 4 Tahun Penjara", dalam <https://nasional.tempo.co/read/517040/jenderal-djaja-suparman-divonis-4-tahun-penjara/full&view=ok>, diakses 12 September 2019

E. Putusan

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2011

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 17-K/PMT-II/AD/VII/2011

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/AD/XII/2016